

TESIS

ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh :

NAMA : ALFRIANI KLASININGTYAS WARDANSTUTI

NPM : 2043021005

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2024

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Alfriani Klasiningtyas Wardanastuti
NPM : 2043021005
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : ANALISIS PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK NEGARA PADA
LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN
LAUT REPUBLIK INDONESIA
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Analysis of the administration of State
Property In Badan Keamanan Laut

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis
Tanggal : 13 Juni 2024

Pembimbing I



(Prof. Dr. R Luki Karunia, MA)

Pembimbing II



(Arifiani Widjayanti, SP.,M.Si.,Ph.D)

J A K A R T A

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

NAMA : ALFRIANI KLASININGTYAS WARDANASTUTI
NPM : 2043021005
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA BADAN KEAMANAN LAUT

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024
Pukul : 13.30 s.d 15.00

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Asropi, M.Si
Sekretaris : Ratri Istantia, S.IP.,MA., Ph.D
Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Pembimbing 1 : Prof. Dr. R Luki Karunia, MA
Pembimbing 2 : Arifiani Widjayanti, SP.,M.Si.,Ph.D



(Handwritten signatures in blue ink over the stamp and dotted lines)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfriani Klasiningtyas Wardanastuti

NPM : 2043021005

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir yang telah saya buat ini dengan judul "Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Badan Keamanan Laut", merupakan **hasil karya sendiri dan benar keasliannya**.

Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia, menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA-LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sehat dan tidak alam paksaan.

Jakarta, 13 Juni 2024
Yang memberikan Pernyataan



Alfriani Klasiningtyas Wardanastuti

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta. Dalam proses penyusunannya, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak.MA.CA.CACP selaku Dosen Pembimbing I** dan **Ibu Arifiani Widjayanti, S.P., M.SI.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa kerelaan hati meluangkan waktu serta penuh kesabaran dan sikap professional penuh sebagai pembimbing .**

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Ibu Ratri Istania, Ph.D selaku dosen pembahas yang telah memberikan saran dan masukan
3. Bapak Dr. Asropi, SIP.,M.Si selaku dosen pembahas yang telah memberikan saran dan masukan
4. Segenap dosen STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya selama dua tahun menjalankan studi pada Program Magister Administrasi di Politeknik STIA LAN Jakarta
5. Bapak Rudi Parulian Simorangkir, S.E , Kepala Biro Sarana dan Prasarana yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian

6. Bapak Ardian Noverianto, Kasubbag Penatausahaan BMN yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian
7. Rekan-Rekan Subbag Penatausahaan BMN yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian
8. Rekan-Rekan Operator Persediaan yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian ini
9. Rekan-rekan seperjuangan di STIA LAN angkatan covid yang sudah memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini
10. Keluarga dan suami tercinta (Dicky Leonald Perdana Putra) dan Adik (Putra) yang selalu mendukung dalam proses penyusunan tesis ini sampai selesai
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat membantu dan bermanfaat khususnya Bagian Pendayagunaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Badan Keamanan Laut, serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juni 2024

Penulis

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisa penatausahaan barang milik negara dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara di Badan Keamanan Laut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan kunci. Prosedur pengolahan data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembukuan di Badan Keamanan Laut telah dilakukan dengan transparan, akurat dan akuntabel. Penerapan inventarisasi di Badan Keamanan Laut masih belum optimal dikarenakan tidak ada dukungan anggaran untuk melakukan inventarisasi aset yang ada di kantor daerah. Penerapan pelaporan di Badan Keamanan Laut telah sesuai dengan PMK 181/ 2016 tentang penatausahaan Barang Milik Negara sehingga pelaporan penatausahaan barang milik negara telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Saran dalam penelitian ini penatausahaan Barang Milik Negara diperlukan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan barang milik negara. Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi guna memperbaiki proses inventarisasi dan memperkuat aspek yuridis terkait kepemilikan BMN. Di sisi lain, dalam aspek pelaporan, meskipun entitas pelaporan di Bakamla RI berhasil mengelola data BMN secara efisien melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN, masih terdapat tantangan terkait kesesuaian data fisik dengan yang tercatat dalam aplikasi. Ini mengakibatkan kurangnya konsistensi dalam pelaporan.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

This research aims to analyze the administration of state property from bookkeeping, inventory and reporting to increase transparency and accountability in the management of state property at the Maritime Security Agency. The research method used is a qualitative method. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. Interviews were conducted with key informants. The data processing procedure uses descriptive analytical methods. The results of this research show that the implementation of bookkeeping at the Maritime Security Agency has been carried out in a transparent, accurate and accountable manner. The implementation of inventory at Badam Maritime Security is still not optimal because there is no budget support to carry out an inventory of assets in regional offices. The implementation of reporting at the Maritime Security Agency is in accordance with PMK 181/2016 concerning the administration of State Property so that reporting on the administration of state property is carried out in a transparent and accountable manner. The suggestions in this research are that administration of State Property is needed in order to increase the effectiveness and efficiency of managing state property. Systematic efforts are needed to increase transparency and compliance with regulations in order to improve the inventory process and strengthen the juridical aspects related to BMN ownership. On the other hand, in the reporting aspect, although the reporting entity in Bakamla RI has succeeded in managing BMN data efficiently through the SAKTI and SIMAN applications, there are still challenges related to the compatibility of physical data with what is recorded in the application. This results in a lack of consistency in reporting.

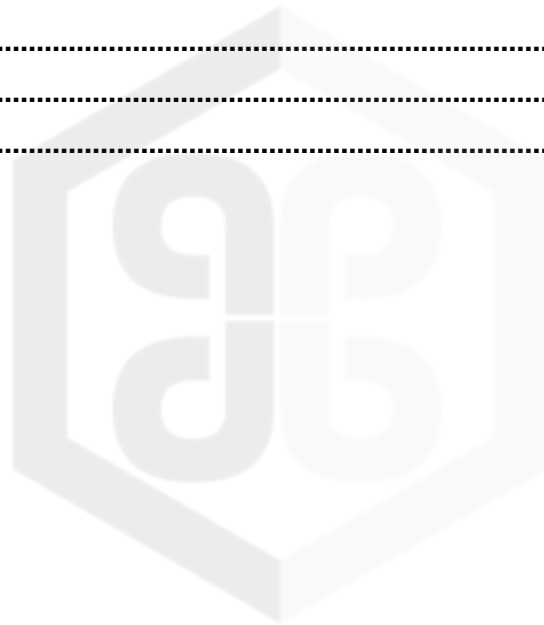


**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Permasalahan	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	13
1. Tinjauan Kebijakan	13
2. Tinjauan Teori.....	28
C. Konsep Kunci	36
D. Kerangka Berpikir	36
BAB III.....	39
METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Metode Penelitian.....	39

B.	Teknik Pengumpulan Data	40
C.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
D.	Instrumen Penelitian	44
BAB IV		45
HASIL DAN PEMBAHASAN		45
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	45
B.	Hasil dan Pembahasan	53
C.	Strategi Untuk Menyelesaikan Permasalahan	99
BAB V		102
KESIMPULAN DAN SARAN		102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		105



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Siklus Pengelolaan BMN	3
Gambar 2. 1 Bagan Arus Penyampaian Daftar Barang/Daftar Mutasi dan Laporan BMN	26
Gambar 2. 2 Kerangka berpikir	38
Gambar 3. 1 Proses analisis data.....	43
Gambar 4. 1 Misi Presiden terkait Bakamla RI.....	48
Gambar 4. 2 Visi Misi dan Tujuan Bakamla RI	49
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Keamanan Laut RI.....	50
Gambar 4. 4 Struktur Biro Sarpras Bakamla RI	51
Gambar 4. 5 Struktur Biro Umum Bakamla RI	52
Gambar 4. 6 Struktur UAPKPB Persediaan Bakamla RI.....	53
Gambar 4. 7 Kertas kerja pencatatan aset tetap.....	61
Gambar 4. 8 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	61
Gambar 4. 9 Laporan kondisi barang	63
Gambar 4. 10 Daftar Permintaan Dokumen dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Bakamla	67
Gambar 4. 11 Pelaksanaan Inventarisasi Tahun 2018	68
Gambar 4. 12 Berita Acara Stock Opname.....	76
Gambar 4. 13 Listing sejarah Transaksi BMN.....	77
Gambar 4. 14 Temuan BPK	78
Gambar 4. 15 Kartu Identitas Barang Tanah SPKKL Kupang.....	79
Gambar 4. 16 Berita Acara Rekonsiliasi dengan DJKN.....	90
Gambar 4. 17 Catatan atas Laporan Keuangan Bakamla.....	97
Gambar 4. 18 Neraca Laporan Keuangan Bakamla	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Temuan data Pengelolaan barang milik negara	4
Tabel 3. 1 Daftar Key Informan	42
Tabel 4. 1 Dokumen Kelengkapan Input Data BMN	56
Tabel 4. 2 Daftar Temuan terkait Penatausahaan BMN	64
Tabel 4. 3 Hasil Pemeriksaan atas Sampel ATB - Software Komputer.....	69
Tabel 4. 4 Tabel Aset yang telah di PSP.....	82
Tabel 4. 5 Jadwal Rekonsiliasi Internal di Unit Pengguna Barang dan Pengguna Anggaran.....	87
Tabel 4. 6 Jadwal Rekonsiliasi Data dan Penyampaian Laporan Semester I	88
Tabel 4. 7 Jadwal Rekonsiliasi Data dan Penyampaian Laporan Semester II dan Tahunan.....	88



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I 106
LAMPIRAN II 108



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki wilayah maritim yang strategis yang menjadi aset penting dalam pembangunan nasional. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Kementerian Kelautan)).

Sir Walter Raleigh menyatakan bahwa laut menjadi salah satu faktor dalam mempertahankan eksistensi wilayah suatu negara dengan dalil “Barang siapa yang menguasai laut, ia akan menguasai dunia” (Dinas Penerangan Angkatan Laut, 2013). Gagasan inilah yang kemudian mengilhami agenda strategis dalam visi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Konsep poros maritim tersebut memiliki lima pilar, yaitu budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim.

Unsur utama pembangunan pertahanan negara juga masih belum dapat mendukung pembangunan postur pertahanan negara yang ideal (Mundayat, Widodo, & Prakasa, 2018). Dalam implementasinya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan trans-nasional yang biasa terjadi di laut. Penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, human trafficking (penyelundupan manusia) dan boat people (manusia perahu), terorisme dan bajak laut, dan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing merupakan kejahatan-kejahatan yang sering terjadi (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018). IUU fishing dilakukan oleh kapal ikan asing dan kapal berbendera Indonesia yang secara ilegal masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi izin dari pemerintah (Pamase & Utomo, 2018). Praktik ini tentu sangat merugikan negara setiap tahunnya karena ekspor dari hasil penangkapan ikan di teritorial Indonesia tidak tercatat dan aktivitas di pelabuhan hingga pasar lelang mengalami kematian akibat praktik pemindahan muatan di tengah laut (transshipment).

Menyadari adanya kebutuhan untuk mengamankan wilayah laut Indonesia yang semakin kompleks maka dibentuklah Badan Keamanan Laut untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Badan Keamanan Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla RI bertugas melakukan patroli keamanan di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia. (Damanik & Shauki, 2019) Untuk memastikan proses hukum yang ditangani oleh Bakamla dapat diselesaikan, Bakamla bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan atau melakukan proses hukum lebih lanjut (I Kadek Darmawan, 2021) secara efektif dan pemerintah negara bagian.

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah satuan kerja lembaga pemerintah non kementerian. Dimana dalam mendukung seluruh kegiatan operasional Bakamla RI setiap tahunnya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala Badan Keamanan Laut sebagai Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Salah satu hal yang sangat penting untuk mengevaluasi kemajuan suatu perusahaan adalah cara mereka mengelola barang atau aset yang mereka miliki. Hal yang serupa berlaku untuk instansi pemerintahan, di mana sistem pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) atau aset yang dimiliki oleh instansi tersebut merupakan bagian integral dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang kemudian diperinci oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, yang telah mengalami beberapa perubahan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Prosedur teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga, serta sejumlah peraturan lainnya yang mengatur aspek-aspek tertentu dari pengelolaan BMN, seperti Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN, Dokumen Kepemilikan BMN,

Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab BMN, dan Penatausahaan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.



Gambar 1. 1 Siklus Pengelolaan BMN

Sumber : <http://Twitter.com/kemenkeuri>

Salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan Barang Milik Negara adalah Penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Penatausahaan barang milik negara memiliki tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam rangka pengelolaan barang milik negara. Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara dapat berpedoman pada peraturan menteri keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Kementerian Keuangan, 2018).

Barang Milik Negara adalah unsur penting dalam penyelenggaraan roda pemerintah, khususnya pada penyediaan layanan terhadap masyarakat (Andansari, Mursidi and Jihadi 2022). Dengan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara sesuai peraturan yang berlaku dapat memberikan manfaat dalam perencanaan kebutuhan anggaran serta pemeliharaan aset di tahun anggaran yang akan datang. Penatausahaan barang milik negara yang baik juga

dapat mengurangi potensi penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Gambaran umum yang tampak pada instansi atau organisasi pemerintah di Indonesia dalam pengelolaan BMN adalah adanya penyimpangan didalam pencatatan dan pelaporan barang milik negara. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP dalam kurun waktu 5 tahun pada tahun 2018 sampai 2022, BPK RI mengungkap permasalahan terkait pengelolaan aset tetap yang belum memadai.

Tabel 1. 1 Temuan data Pengelolaan barang milik negara

NO	TAHUN	Deskripsi temuan
1.	2018	Kurangnya pengendalian pengelolaan persediaan di kementerian/lembaga mengakibatkan pencatatan dan penatausahaan barang inventaris dan inventaris tidak sesuai dengan ketentuan.
		Kurangnya pengendalian pengelolaan aset tetap di kementerian/lembaga yang menyebabkan inkonsistensi neraca BMN dan inkonsistensi penatausahaan dan pencatatan aset tetap.
		Kurangnya pengendalian di mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penimbangan BMN
2.	2019	Terdapat perbedaan pencatatan saham dengan ketentuan 53 kementerian/lembaga
		Kurangnya pengendalian pengelolaan aset tetap di 77 kementerian/lembaga mengakibatkan terjadinya kesalahan saldo BMN dan pengelolaan aset tetap tidak sesuai ketentuan.
		Kurangnya pengendalian pengelolaan aset tak berwujud di 32 kementerian/lembaga mengakibatkan ketidakakuratan dalam neraca dan penatausahaan BMN serta memenuhi
3.	2020	Masih belum ada pengelolaan inventarisasi sebesar Rp4,59 triliun di 39 kementerian/lembaga
		Pengendalian terhadap pengelolaan aktiva tetap kurang memadai sehingga berdampak pada keabsahan dan keakuratan data
		Di 56 kementerian/lembaga, masih terdapat kurangnya kontrol terhadap pengelolaan aset tidak berwujud dan aset lainnya.
4.	2021	Pengelolaan persediaan dan sistem informasi
		Kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan aktiva tetap menyebabkan kesalahan dalam neraca BMN
		Sistem Informasi Pengelolaan BMN belum sepenuhnya mendukung

5	2022	Penatausahaan dan pengelolaan barang yang tidak dikuasai, barang milik negara (BMN) dan barang milik negara tidak didukung dengan pengawasan yang memadai dan tidak memenuhi ketentuan.
---	------	---

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat, Badan Pemeriksa Keuangan 2018– 2022

Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) adalah benda yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau berasal dari sumber perolehan lain yang sah, termasuk Persediaan, Tanah, Gedung/Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Aset Tetap lainnya mencakup Konstruksi dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud, Aset Kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lainnya. BMN dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu BMN Persediaan, BMN Aset Tetap, dan BMN Aset Tidak Berwujud. Pengaturan aset tetap pada instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang berbasis akrual.

Pada tahun 2016 sampai tahun 2020 instansi Bakamla mendapatkan opini "disclaimer" atau tidak menyatakan pendapat dari BPK. Berbagai penyimpangan dalam penatausahaan BMN sehingga mengakibatkan Bakamla mendapatkan opini tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 14a/HP/XIV/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 mengungkapkan, penyajian saldo persediaan pada neraca Laporan Keuangan Bakamla tidak dapat diyakini keandalan dan kewajaran serta pengelolaan aset tetap yang belum tertib. Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat tersebut sebagaimana diungkap pada Laporan BPK bahwa Aset Tetap atas Laporan Keuangan, Bakamla menyajikan Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,19 Triliun. Pengujian atas saldo aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2017 menunjukkan terdapat Aset Tetap sebesar Rp 184,79 Miliar yang berasal dari alih status aset Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, belum jelas keberadaannya. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai aset tersebut diatas (BPK, 2017).

Dapat terlihat pada laoran hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI, bahwa penatausahaan barang milik negara di Badan Keamanan Laut belum optimal. Permasalahan atau kekurangan dalam penatausahaan barang milik negara di bakamla saat ini dikelola oleh unit kerja eselon II yang berbeda, yaitu aset lancar dikelola oleh Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Umum serta aset tetap dikelola oleh Bagian Pendayagunaan dan Penatausahaan BMN Biro Sarpras. Persediaan dan aset tetap yang berasal dari pembelajaan pengadaan PPK didistribusikan untuk kantor-kantor stasiun juga serta kapal-kapal negara yang tidak berlokasi di Jakarta. Pada setiap kegiatan pendistribusian barang milik negara ke unit kerja kantor daerah dan Kapal Negara hanya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pegawai Barang Milik Negara hanya bertugas sebagai operator aplikasi SAKTI yang menginput persediaan atau aset tetap berdasarkan administrasi berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Aset-aset yang terdistribusi diluar lokasi kantor Bakamla Pusat tidak diberikan label sementara, sehingga kontrol atas keberadaan dan kondisi aset-aset serta tahun perolehan aset tersebut akan susah teridentifikasi.

PSAP No. 07 mengklasifikasikan aset tetap menjadi tanah, peralatan dan mesin, gedung/bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Setiap kantor pemerintahan memiliki banyak aset tetap yang merupakan milik daerah dan harus dikelola dengan baik untuk menjaga kondisinya. Pengelolaan aset yang efektif akan berkontribusi pada kelancaran kegiatan instansi pemerintah. Manajemen barang milik daerah penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas administratif sebuah instansi, serta dalam menyusun laporan pertanggungjawaban untuk setiap tahunnya. Laporan tersebut memungkinkan pertanggungjawaban atas keuangan pada neraca pemerintah pusat. Efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah menjadi kunci untuk mendukung fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam konsep pembukuan adalah kompleksitas dan pentingnya manajemen yang efektif atas aset negara yang digunakan dalam operasional mereka. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas

keamanan laut, Bakamla RI memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kapal patroli, peralatan navigasi, dan sumber daya lainnya yang menjadi bagian dari BMN. Namun, mereka mungkin dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan penatausahaan dengan baik. Dalam konteks pembukuan, perlunya kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan BMN, serta penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, pemantauan, dan pelaporan aset. Tidak hanya itu, pengawasan dan pengendalian internal juga menjadi krusial untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau kerugian aset negara. Oleh karena itu, studi lebih lanjut tentang pelaksanaan penatausahaan BMN pada Bakamla RI dalam konteks pembukuan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan, praktik terbaik, dan peluang untuk peningkatan manajemen aset negara di lingkungan tersebut.

Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam konsep pembukuan adalah sebuah konteks yang memerlukan manajemen yang efektif dan transparan atas aset negara yang digunakan dalam operasional mereka. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan laut, Bakamla RI harus mengelola berbagai jenis barang milik negara, termasuk kapal patroli, peralatan navigasi, dan infrastruktur lainnya yang menjadi bagian integral dari BMN. Namun, dalam melaksanakan tugas ini, Bakamla RI mungkin menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan penatausahaan BMN dengan baik.

Dalam konteks pembukuan, penting bagi Bakamla RI untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan BMN. Hal ini melibatkan pencatatan, pemeliharaan, dan pelaporan yang akurat atas aset-aset tersebut. Namun, kompleksitas pengelolaan aset BMN yang melibatkan berbagai jenis barang dan peralatan, serta aspek keamanan dan operasionalnya, dapat membuat proses penatausahaan menjadi rumit dan memerlukan pengelolaan yang cermat. Penggunaan teknologi informasi yang tepat, seperti

sistem informasi manajemen, dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pemantauan aset BMN.

Tidak hanya itu, pengawasan dan pengendalian internal juga menjadi aspek penting dalam penatausahaan BMN. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau kerugian aset negara, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Bakamla RI perlu mengembangkan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang kuat untuk memastikan integritas dan keamanan aset BMN.

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam konsep inventarisasi menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dicermati. Fenomena yang terjadi mencakup keterbatasan sistem administrasi yang mungkin memperlambat proses inventarisasi, ketidakjelasan dalam prosedur pengelolaan BMN, ketidakefisienan penggunaan sumber daya, potensi kecurangan dan penyalahgunaan, serta ketidakmampuan untuk memantau aset dengan efektif. Kurangnya integrasi sistem, prosedur yang tidak terdefinisi dengan baik, dan kekurangan pedoman yang konsisten dapat menghambat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Selain itu, ketidakjelasan prosedur juga menciptakan celah bagi potensi kecurangan dan penyalahgunaan aset negara. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus dilakukan dengan memperkuat sistem administrasi, meningkatkan transparansi, dan menerapkan prosedur inventarisasi yang jelas dan terstruktur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan BMN oleh Bakamla RI dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta untuk menghindari risiko kerugian dan penyalahgunaan aset negara.

Barang Milik Negara merupakan bagian dari aset yang dikelola oleh negara untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan yang baik dari Barang Milik Negara memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya negara, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta perencanaan keuangan yang matang. Dengan demikian, pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal berkontribusi pada kesehatan keuangan negara secara keseluruhan.

Pada saat ini penatausahaan Barang Milik Negara masih menjadi perhatian khusus dalam pemeriksaan BPK dan berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam terkait Penatausahaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Peneliti mengkaji permasalahan yang ada dengan menganalisa kesesuaian penatausahaan Barang Milik Negara berdasarkan PMK 181/PMK.06/2016. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam suatu proses atas masalah dalam pengelolaan barang milik negara khususnya penatausahaan Barang Milik Negara dan dapat memberikan masukan upaya-upaya yang perlu diperbaiki agar penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan sasaran pengelolaan BMN.

Beberapa alasan itulah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan judul: **“Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya sistem pembukuan yang terintegrasi dengan baik, yang dapat mengakibatkan pencatatan yang tidak konsisten atau tidak lengkap dari BMN yang dimiliki oleh Badan Keamanan Laut.
2. Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan dalam Pengelolaan BMN
3. Potensi masalah terkait dengan kurangnya mekanisme pengendalian internal yang efektif dalam penatausahaan BMN, seperti kelemahan dalam sistem kontrol internal, yang dapat meningkatkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan BMN.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat merumuskan fokus pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan penatausahaan Barang Milik Negara pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam pelaksanaan laporan keuangan di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia?

2. Bagaimanakah strategi penatausahaan barang milik negara pada satuan kerja Badan Keamanan Laut ?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisa Penatausahaan Barang Milik Negara yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.
2. Untuk menyusun strategi penatausahaan Barang Milik Negara yang transparan dan akuntabel pada Badan Keamanan Laut.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dalam bidang administrasi pembangunan negara dan secara khusus dalam bidang administrasi manajemen keuangan negara terkait pengelolaan barang milik negara sebagai sumber informasi dan inspirasi dalam melakukan penelitian terkait pengelolaan barang milik negara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengambil keputusan dalam pengelolaan barang milik negara khususnya penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. sehingga dengan pengelolaan barang milik negara yang optimal dan tertib akan menyajikan laporan keuangan menjadi lebih akuntabel pada Badan Keamanan Laut RI.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan penatausahaan barang milik negara pada Badan Keamanan Laut secara umum dapat dikatakan cukup baik meskipun masih terdapat pengelolaan aset yang belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan dipandang dari aspek pembukuan, aspek inventarisasi, dan aspek pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan BMN ditinjau dari sub aspek posisi keuangan/neraca dan sub aspek pemeriksaan ditinjau dari sudut pengungkapan barang milik negara yang telah dicatat dan didaftarkan sesuai dengan dokumen sumber, sesuai kondisi dan informasi dengan lengkap dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian diketahui pembukuan BMN pada Badan Keamanan Laut telah melakukan evaluasi kelengkapan dokumen sumber, melakukan penghitungan sesuai kondisi dengan tertib, melakukan klasifikasi sesuai kelompok kode barang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Badan Keamanan Laut telah menerapkan proses pembukuan sesuai prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan meskipun masih terdapat temuan pemeriksaan dari BPK namun dapat segera ditindaklanjuti. Dengan memperhatikan, kaidah-kaidah yang berlaku terkait pembukuan, pengelolaan barang milik negara di Badan Keamanan Laut telah dilakukan dengan transparan, akurat dan akuntabel.

Terdapat hambatan pada aspek pembukuan yaitu (1) terdapat informasi yang tidak tersampaikan pada dokumen sumber penginputan aset lancar dan aset tetap; (2) kurangnya dukungan dari pimpinan terkait pengelolaan barang milik negara; (3) tidak Pernah melakukan Monitoring dan Evaluasi dengan Bagian Perencanaan anggaran dan PPK Pengadaan; dan (4) lemahnya koordinasi dengan PPK Pengadaan sehingga terdapat informasi yang tidak tersampaikan.

2. Inventarisasi BMN ditinjau dari sub aspek fisik dan sub aspek yuridis ditinjau dari sudut identifikasi keberadaan BMN sesuai catatan Aplikasi, identifikasi keberadaan BMN telah lengkap dokumen kepemilikan, bahwa inventarisasi dilakukan setelah pembukuan dan pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui inventarisasi BMN Badan Keamanan Laut belum dilaksanakan dengan optimal dikarenakan:

a) inventarisasi BMN keseluruhan dilaksanakan terakhir pada tahun 2018, berdasarkan informasi dari Informan bahwa belum ada rencana lagi untuk melakukan sensus BMN dikarenakan tidak ada dukungan anggaran untuk melaksanakan, mengingat BMN yg dikelola tidak hanya di pusat namun berada di kantor daerah juga;

b) Inventarisasi dilakukan Tahun 2022 hanya aset Kendaraan Dinas yang berada di kantor pusat.

Sehingga dari kondisi tersebut penerapan inventarisasi di Badan Keamanan Laut belum mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang transparan, akurat dan akuntabel.

3. Pelaporan BMN ditinjau dari sub aspek entitas pelaporan dan sub aspek standar pelaporan ditinjau dari sudut pelaporan BMN telah dilakukan berjenjang, pelaporan BMN telah direkonsiliasi secara internal, pelaporan BMN telah direkonsiliasi secara eksternal, dapat disimpulkan bahwa pelaporan cukup optimal, kendala yang terjadi hanya saat penginputan terkadang aplikasi SAKTI mengalami eror. Penerapan pelaporan barang milik negara Badan Keamanan Laut telah sesuai dengan PMK 181 Tahun 2016 tentang penatausahaan barang milik negara.

Terdapat hambatan pada aspek pelaporan meski hambatan tersebut bukan dari pelaksana penatausahaan BMN namun hambatan terjadi karena kontrak pengadaan yang tidak merinci aset-aset sehingga membutuhkan waktu lama untuk pelaksana penatausahaan BMN menyampaikan laporan kepada pengelola barang.

B. Saran

Untuk lebih memaksimalkan penatausahaan barang milik negara pada Badan Keamanan Laut, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagian pendayagunaan dan penatausahaan Bakamla RI perlu segera merancang instrumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang jelas, mencakup tujuan, metode, jadwal dan tim yang akan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Monev pengelolaan barang milik negara khususnya penatausahaan barang milik negara. Bagian pendayagunaan dan penatausahaan BMN juga perlu membuat Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan BMN.
2. Bagian pendayagunaan dan penatausahaan melibatkan Inspektorat dalam proses monev dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pengelolaan BMN dan membuat rencana mitigasi risiko. Dengan telah membuat mitigasi risiko inspektorat dapat melakukan audit internal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan BMN. Pihak yang terlibat memastikan setiap temuan dari hasil monev ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan yang konkret.
3. Untuk melaksanakan tercapainya seluruh penatausahaan BMN yang tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum maka sangat penting diterapkan komitmen para pihak baik komitmen dari pimpinan maupun dari tim atau petugas sehari-hari.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Andansari, Ekowani, Mursidi, and Muhamad Jihadi. (2022). Business Innovation Management and Entrepreneurship The Influence of Recording, Inventorying, Reporting and Application On The Quality of Financial Report (Case of SIMAK-BMN).
- A Gima Sugiama. (2013). Manajemen Aset Pariwisata Bandung: Guardaya Intimarta.
- Andul Halim dan Mamduh M. Hanafi 2003. Analisis Laporan Keuangan, Unit penerbit dan Percetakan AMP-YKPN, YogyakartaBPK. (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut Tahun 2017*.
- Damanik, S., & Shauki, E. R. (2019). Analisis Opini Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Ri (Studi Pada Badan Keamanan Laut Ri). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 385–402. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i4.166>
- Emzir. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Kelautan. (n.d.). Manajemen Logistik Bahan Bakar Minyak Dan Pelumas (Bmp) Di Kapal Republik Indonesia (Kri) Dalam Rangka Mendukung Tugasoperasi Komando Armada I Logistic Management of Fuel Oil and Lubricants on the Indonesianwarship To Support 1 St Fleet Command Operationa. 276 | *Jurnal Manajemen Pertahanan* |, 8(2).
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. 1–794.
- Ridlo, Ilham Akhsanu., et al. (2018). *FGD Dalam Penelitian Kesehatan*.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. 17(33), 81–95.
- Sugiyono, P. . (2017). *Metode Penelitian Bisnis : pendekatan kuantitatif, kualitatif, Kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulianto. (2018). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). *Inventarisasi*. 5(3), 248–253.